



Pemkot Atur Rayon Sekolah

Pemkot harus tentukan kuota bagi sekolah negeri menerima siswa tak mampu.

YOGYAKARTA — Pemkot Yogyakarta akan melakukan rayonisasi terhadap sekolah dari TK hingga SMA. Program tersebut bertujuan selain untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah juga dalam upaya meminimalkan kemacetan arus lalu lintas di Yogyakarta pada pagi dan siang hari.

Melalui rayonisasi menurut Walikota Herry Zudianto nantinya tidak akan ada lagi sekolah favorit dan non favorit. Semua sekolah kata dia, kualitasnya sama. "Anak yang tinggal di Yogya Utara akan sekolah di Yogya Utara, kemudian di Yogya

Selatan juga begitu. Tidak ada sekolah favorit dan non favorit. Semua sekolah sama dan tidak akan ada kemacetan menjelang dan pulang sekolah," tandasnya kepada wartawan, Jumat (16/1).

Diakuinya, rencana tersebut saat ini tengah di godok oleh Pemkot Yogyakarta. "Baru kita godok, mungkin dua atau tiga tahun lagi," terangnya.

Dengan sistem tersebut lanjutnya, selain pemerataan kualitas pendidikan pihaknya juga ingin mengatasi ancaman kemacetan arus lalu lintas di Yogyakarta. Kebijakan tersebut kata dia, juga merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah nomor 48 tentang pemerataan kualitas pendidikan dan jaminan pendidikan.

"Mestinya Jakarta juga melakukan rayonisasi sekolah sehingga tingkat kemacetan bisa berkurang. Memajukan atau memundurkan jam pelajaran tidak akan menyelesaikan masalah. Di negara maju bahkan sekolah SMA itu sudah per kecamatan. Anak-anak di kecamatan itu yang sekolahnya di situ. Itu efisien dan efektif dengan kualitas yang merata," tandas Herry.

Kebijakan rayonisasi menurut Herry, juga untuk menjamin anak-anak yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah akan memperoleh peluang besar untuk masuk sekolah tersebut tanpa harus jauh-jauh ke sekolah lain.

Pasalnya kata dia, selama ini masyarakat seringkali mengejar sekolah-sekolah yang dianggap favorit sebagai tujuan pendidikan anaknya.

Bahkan orang tua seringkali tidak memikirkan jauhnya jarak yang harus ditempuh si anak untuk menuju sekolah tujuannya itu.

"Dengan rayonisasi anak-anak akan jauh lebih dekat ke sekolah. Dengan begitu biaya transportasi yang dikeluarkan orang tua lebih ringan," tambahnya.

Harus diperjelas

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Ardiyanto mengatakan, gagasan tersebut pernah dibahas komisi A DPRD Kota Yogyakarta bersama Dinas Pendidikan. Menurutnya, gagasan tersebut memang cukup bagus untuk pemerataan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

"Sekolah di Yogyakarta memang seharusnya menerapkan rayonisasi pendidikan. Setidaknya ada lima rayon. Tetapi masalahnya perayonan itu didasarkan atas apa, apakah wilayah atau berdasar

prestasi sekolah atau apa. Itu yang perlu diperjelas," paparnya.

Selama ini kata dia, sudah ada beberapa sekolah yang oleh masyarakat di cap sebagai sekolah favorit. Masalahnya kemudian apakah sekolah yang sudah mendapat julukan terbaik itu mau menerima kebijakan tersebut atau tidak. "Masalah ini harus dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh Pemkot," pintanya.

Terkait pemerataan pendidikan untuk masyarakat miskin, Komisi A bahkan pernah mengusulkan agar penduduk miskin diberikan kuota tersendiri di sekolah negeri terutama SMP dan SMA.

"Sebab di sekolah negeri biaya pendidikan sudah ditanggung pemerintah. Ironisnya berdasarkan data jumlah siswa miskin kita lebih banyak sekolah di swasta dibandingkan sekolah negeri. Itu juga harus dicarikan solusinya."

Komisi A kata Ardiyanto, mengacu pada UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) pernah mengusulkan agar kuota yang harus diberikan pada masyarakat miskin untuk sekolah negeri minimal 20 persen.

Berdasarkan data Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, jumlah siswa miskin yang belajar di sekolah negeri sebanyak 1.000 siswa. Sementara siswa miskin yang belajar di sekolah swasta sebanyak 1.500 siswa lebih.

Karena itulah selain rayonisasi, yang lebih penting menurut Ardiyanto, adalah pemerataan kesempatan bagi siswa miskin untuk sekolah di sekolah negeri.

Menanggapi masukan Komisi I DPRD Kota Yogyakarta terkait kuota untuk siswa miskin di sekolah negeri tersebut, Herry Zudianto mengatakan bahwa gagasan

1.
 2. Negatif Amat segera Untuk ditanggapi

tersebut cukup bagus.

Saat ini pihaknya juga masih menggodok kemungkinan kuota tersebut pada penerimaan siswa baru (PSB) tahun ajaran baru mendatang di sekolah negeri. "Gagasan tersebut sudah kita tampung dan akan digodok dalam PSB tahun ini," tegasnya.

Sejumlah orang tua murid di Yogyakarta yang dihubungi mengaku mendukung rencana rayonisasi tersebut. Ny Gatot (28) penduduk Jalan Tukangan berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam waktu yang tidak lama. "Tiap PSB sebagai orang tua kita dibuat pusing harus mencari sekolah, kalau sudah jelas seperti ini, kita juga akan mudah mencari," ujarnya.

■ yli

'BOS akan memenuhi kebutuhan sekolah...'

Oleh Nadia Maharani
HARIAN JOGJA

JOGJA: Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang akan digulirkan dalam waktu dekat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Baik Pemerintah Provinsi DIY maupun pemerintah kota/kabupaten akan membantu memenuhi kebutuhan apabila BOS dirasa kurang mencukupi.

Baskara Aji, Kepala Bina Program Dinas Pendidikan DIY, mengatakan, kebutuhan tiap sekolah tidak sama, sehingga bila dana BOS yang disalurkan dinilai tidak mencukupi kebutuhan, pemerintah provinsi dan kabupaten-kota siap membantu.

"BOS tahun ini mengalami kenaikan jumlah yang diterimakan. Dalam BOS kali ini, untuk buku dan tunai sudah menjadi kesatuan, tidak seperti tahun lalu yang terpisah," jelasnya pada

Harian Jogja, kemarin.

Sekolah, tegasnya, harus memanfaatkan sebagian dana BOS untuk pengadaan buku sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing.

Dana yang digulirkan untuk setiap siswa SD-SMP per tahunnya naik sekitar 50% dibanding 2008. Pada 2009, setiap siswa SD mendapat Rp397.000 per tahun untuk tingkat kabupaten, dan Rp400.000 per tahun di tingkat kota.

Sedangkan bagi setiap siswa SMP mendapat Rp570.000 di tingkat kabupaten, dan Rp575.000 di tingkat kota per tahunnya. Sebelumnya, dana BOS yang diterima tiap siswa SD sebesar Rp254.000 dan siswa SMP Rp354.000 per tahun.

"Tahun ini dana BOS dibedakan sesuai tingkat tinggi-rendahnya biaya di kabupaten-kota yang bersangkutan. BOS juga disusun berdasarkan praktek di sekolah," jelasnya.

Dia juga mengatakan, saat ini pencairan dana BOS untuk Januari-Maret sedang dalam proses. Diharapkan dana itu bisa segera cair untuk disalurkan ke setiap sekolah secepatnya.

Sebelumnya, Herry Zudianto, Walikota Jogja, mengatakan, dana BOS yang berasal dari APBD senilai Rp30 miliar akan mulai disalurkan pada akhir Januari. Mekanismenya cukup sederhana, seperti penarikan SPP biasa dan dana harus cair setiap bulan.

Khusus untuk pelajar miskin, selain mendapat pendidikan gratis secara total, juga mendapat bantuan berupa seragam sekolah, buku hingga pakaian olahraga.

Sedangkan bagi pelajar SD-SMA yang tidak miskin, lanjutnya, hanya biaya registrasi dan heregistrasi yang digratiskan. Penggratiskan itu, ujarnya, dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 Tahun.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005